



RENCANA KERJA

PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 setelah dilakukan refocusing anggaran. Rancangan perubahan rencana kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Kami berharap semoga Rancangan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Painan, September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia aparaturnya. Pengembangan sumber daya aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor-faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, sumber daya aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif.

Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuba beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan Pemerintah Daerah umumnya.

Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD 2021 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan

organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2019)
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selama Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- j. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan
- b. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Program Pendidikan Kedinasan

- a. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
- b. Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Seleksi Penerimaan Calon PNS
- b. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- c. Penyusunan Formasi PNS
- d. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen
- e. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai
- f. Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai
- g. Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai
- h. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK
- i. Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS
- j. Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
- k. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
- l. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan
- m. Pembekalan Pasangan Pra Nikah
- n. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS
- o. Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN
- p. Penilaian Evaluasi Kinerja
- q. Pengelolaan Tata Naskah Dinas
- r. Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018

Sampai akhir Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang berjumlah 6 Program dan 39 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana seluruhnya setelah perubahan sebesar Rp. 4.463.694.157,- dengan penyerapan sampai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.135.303.763,- atau mencapai 92,64 %

Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB Nomor 504 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang semula direncanakan selesai pada Tahun 2019, baru dapat dimulai bulan Oktober 2019. Sehingga pelaksanaannya ditunda menjadi bulan Januari s/d Maret 2020.
2. Kegiatan Formasi PNS, yang semula direncanakan dilakukan sosialisasi untuk pembaharuan data e-formasi terhadap peta jabatan dan usulan formasi Tahun 2020 melalui aplikasi yang akan dibuka pada Bulan September s.d November 2019. Namun sampai saat ini pembaharuan data pada aplikasi e-formasi masih belum dapat dilakukan karena masih terkunci oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan.
3. Kegiatan Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, permasalahan yang ditemukan adalah:
 - Peserta yang direncanakan untuk mengikuti dan lulus seleksi pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebanyak 5 orang, namun yang lulus seleksi hanya 1 (satu) orang.
 - Biaya pendidikan An. Muhammad Kadri yang dianggarkan

sebanyak 2 semester @ Rp. 10.000.000,-, namun terealisasi dalam 2 semester hanya Rp. 12.500.000,-

- Biaya bantuan hidup An. Muhammad Kadri yang direncanakan selama 12 bulan, ternyata yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada bulan Agustus 2019 (teralisasi hanya 8 bulan)
 - Bantuan pendidikan dan penelitian untuk PNS yang mendapatkan Tugas Belajar diasumsikan akan melakukan penelitian pada Tahun 2019, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum melakukan penelitian/penyusunan skripsi.
4. Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin, memiliki permasalahan sebagai berikut:
- Kesulitan untuk menemukan alamat suami/istri dari PNS yang mengajukan izin perceraian, karena untuk dapat diberikan izin pereraian kedua belah pihak harus diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang komprehensif sehingga dengan tidak diketahui alamat suami/istri dari PNS tersebut pemeriksaan menjadi kurang komprehensif, bisa jadi keterangan hanya didapat dari sebelah pihak saja. (untuk itu solusi perlunya tim turun ke lapangan untuk mencari keberadaan istri atau suami/keluarga dari PNS yang engajukan perceraian tersebut)
 - PNS yang diperiksa sering tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh tim, karena menutupi kebohongan-kebohongan terkait masalah internal maupun eksternal yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga. Banyak dari PNS yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumah tangga terjadi hanya dari pasangannya saja.
 - Beberapa kepala perangkat daerah terindikasi menyembunyikan indisipliner/permasalahan dispilin PNS/bawahannya dikarenakan “rasa sosial” terhadap bawahannya.
 - Sulit untuk menemukan bukti pemeriksaan kasus untuk itu

dibutuhkan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pemeriksaan Kasus namun anggaran terbatas.

5. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Penyesuaian Gelar, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - Ditemukannya keterlambatan yang sering terjadi dalam memasukkan bahan kenaikan pangkat dari beberapa OPD dan kecamatan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari beberapa OPD terkait, didapati kurang memahami tentang pengkitungan angka kredit dan permasalahan kepegawaian
 - Kesulitan dalam mencapai target kenaikan pangkat dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksaan berkas oleh pihak Kanreg XII BKN Pekanbaru
6. Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - Sarana dan prasarana berupa lemari tempat penyimpanan berkas tata naskah dan map tata naskah masih belum memadai/mencukupi karena keterbatasan anggaran
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian
7. Kegiatan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK dengan permasalahan sebagai berikut
 - Aplikasi SIMPEG versi terbaru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menyajikan informasi sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.
 - Perlu diadakan sosialisasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIMPEG versi terbaru
 - Masih kurang validnya data yang akan di input karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan update data.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											Lembar :		
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		
							Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00	04			<i>Urusan : Penunjang Urusan</i>									
00	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
00	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Pembayaran/ Honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Operasional BKPSDM selama 12 Bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target dan Realisasi Kinerja	Target	Perkiraan Realisasi Capaian
------	----------------------	-------------------	--------	-----------	------------------------------	--------	-----------------------------

				Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Program dan Kegiatan Tahun 2018			Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
								Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
00	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 Bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 Bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 Bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Instansi Terkait	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	16	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
00	04	01	19	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan yang disiapkan dalam 12 bulan	100 %	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target dan Realisasi Kinerja	Target	Perkiraan Realisasi Capaian
------	----------------------	-------------------	--------	-----------	------------------------------	--------	-----------------------------

				Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Program dan Kegiatan Tahun 2018			Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		
1								2	3	4		5	6	7
00	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
00	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan	20 jenis		2 jenis	2 Jenis	100%	2 jenis	6 jenis	60%	
00	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,3 %	
00	04	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	342	64 unit	73 unit	73 unit	100%	77 unit	214 unit	62.57%	
3	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
3	00	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja selama 12 Bulan	66 Laporan	11 laporan	-	-	-	-	33 laporan	50%	
1	20	06	09	Penyusunan Rencana Strategi BKD Tahun 2016-2020	Tersusunnya Renstra BKD Tahun 2016	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%	
3	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
3	00	05	06	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan	53 orang	11 Orang	-	-	-	5 orang	23 orang	43%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	00 05 41	Diklat Teknis Manajemen Kinrja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN	160 orang	-	-	-	-	-	-
3	00 05 09	Diklat Teknis Fungsional Pol PP	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Fungsional Pol PP	15 orang	-	-	-	-	-	-
3	00 05 18	Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)	Jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT)	400 orang	-	100 orang	100 orang	100%	-	100 orang 25%
3	00 05 20	Sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No.1 th 1974 ttg perkawinan	400 orang	-	100 orang	100 orang	100%	-	100 orang 25%
3	00 05 37	Sosialisasi tentang Penyusunan TPP	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan TPP	250 orang	-	250 orang	250 orang	100%	-	250 orang 100%
1	20 05 10	Bimtek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Implementasi SKP PNS PP 46 Tahun 2011	386 orang	86 Orang	-	-	-	-	86 Orang 22.28%
1	20 05 11	Soaialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi UU No. 5 th 2014 ttg ASN	390 orang	90 orang	-	-	-	-	90 orang 23.08%
3	00 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	00	15	10	Pelaksanaan Festival Langkisau	Berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan festival langkisau	100%	-	100%	100%	100%	100%		
3	00	29		Program Pendidikan Kedinasan									
3	00	29	06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	PIM TK.II : 32 org PIM TK.III : 58 org LPJ Gol.III: 28 org	PIM II : 6 org PIM III : 8 org	PIM TK.II (2 org), PIM TK.III (7 org), LPJ Gol. III (3 org)	PIM TK.II : 6 org PIM TK.III : 8 org LPJ Gol. III : 7 org LPJ Gol III : 7 org	PIM TK.II : 14 org PIM TK.III : 22 org LPJ Gol. III: 7 orang LPJ Gol III : 7 org	36.44%		
3	00	29	08	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	190 orang	40 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100 orang	52.63%
3	00	29	09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan	376 orang	30 orang	160 orang	160 orang	100%	66 orang	256 orang	68.09%
3	00	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
3	00	31	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS	1004 orang	-	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	100%	200 orang	404 orang	40.24%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	00	31	40	Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	1050 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	100%	150 orang PNS	450 orang PNS	42.86%
3	00	31	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	384 orang (S1 dan S2)	S1 : 54 org S2 : 59 org	S1 : 28 org S2 : 49 org	S1 : 22 org S2 : 38 org	77.92%	61 org S1 & S2	234 orang (S1 dan S2)	60.94%
3	00	31	16	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS	12550 data	2000 orang	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	100%	2110 orang	6220 orang	49.56%
3	00	31	17	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	Tercapainya kegiatan penyusunan rencana karir PNS, DUK dan Bazetting	150 DUK dan Bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	100%	-	30 buku DUK , 30 buku bazetting	40%
3	00	31	41	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan pemakaian gelar	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	8180 berkas	1140 berkas	1400 berkas	1240 berkas	88.57%	1600 berkas	3980 berkas	48.66%
3	00	31	36	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	601 PNS	32 PNS	200 PNS	129 PNS	64.50%	200 PNS	361 PNS	60.07%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	00	31	22	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Tespen	2000 berkas	462 berkas	500 berkas	488 berkas	97.60%	300 berkas	1250 berkas	62.50%
3	00	31	25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	30 kali sidang	6 kali sidang	4 kali sidang	6 kali sidang	150%	6 kali siding	18 kali sidang	60%
3	00	31	26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat	56 kali sidang	8 kali sidang	4 kali sidang	24 kali sidang	600%	12 kali siding	44 kali sidang	78.57%
3	00	31	27	Pelayanan dan Pendistribusian serta perbaikan kartu pegawai elektronik	Jumlah kartu yang didistribusikan	1622 Lembar	500 Lembar	200 Lembar	522 Lembar	261%	-	1022 Lembar	63.01%
3	00	31	28	Pengkoreksian Angka Kredit	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	5721 berkas	875 berkas	1050 berkas	946 berkas	90.10%	1050 berkas	2871 berkas	50.18%
3	00	31	37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	1187 berkas	179 berkas	185 berkas	208 berkas	112%	200 berkas	587 berkas	49.45%
3	00	31	38	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah Data PNS yang di Update dalam Jaringan Database	35778 data	-	7150 data	7178 data	100.39%	7150 data	14328 data	40.05%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	00	31	39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	273 kasus	-	30 kasus	57 kasus	190%	30 kasus	87 kasus	31.87%
3	00	31	45	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	475 berkas	-	150 berkas	175 berkas	116.67%	-	175 berkas	36.84%
3	00	31	44	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Jumlah Sumpah dan pelantikan jabatan yang dilaksanakan	32 kali	-	5 kali	5 kali	100%	12 kali	17 kali	53.13%
3	00	31	49	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	354 orang	14 jabatan eselon II terisi	-	-	-	60 orang	74 orang	20.90%
3	00	31	43	Rakor kepegawaian pemerintah provinsi sumatera barat dengan pemerintah kab/kota se-sumatera barat	Jumlah peserta yang ikut rakor kepegawaian	72 orang	-	72 orang	72 orang	100%	-	72 orang	100%
3	00	31	52	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	Tercapainya pemetaan potensi pejabat structural	1628 orang PNS	-	803 orang PNS	803 orang PNS	100%	225 orang PNS	1028 orang PNS	63.14%
3	00	31	53	Pembekalan ASN yang memasuki Purnabakti	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	330 orang	-	-	-	-	105 orang	105 orang	31.82%
1	20	31	05	Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah data yang diolah dalam SAPK	4000 data	1000 data	-	-	-	-	1000 data	25%

			(SAPK) secara Online									
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran :
Terbayarnya jasa LAT kantor
Hasil :
Lancarnya kegiatan kantor BKPSDM
Jumlah Dana : Rp. 93.600.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 86.375.265,- atau 92,28 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran.
Hasil :
Tercapainya jasa administrasi keuangan.
Jumlah Dana : Rp. 62.400.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 62.400.000,- atau 100 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor.
Hasil :
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor.
Jumlah Dana : Rp. 37.033.300,-
Realisasi Keuangan : Rp. 36.969.700,- atau 99,83 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan ATK
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan ATK.
Hasil :
Lancarnya administrasi perkantoran
Jumlah Dana : Rp. 98.994.950,-
Realisasi Keuangan : Rp. 80.489.800,- atau 81,31 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

5. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Hasil :
Lancarnya administrasi perkantoran
Jumlah Dana : Rp. 80.081.700,-
Realisasi Keuangan : Rp. 64.160.000,- atau 80,12 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

6. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Hasil :
Lancarnya administrasi perkantoran
Jumlah Dana : Rp. 14.466.300,-
Realisasi Keuangan : Rp. 14.341.300,- atau 99,14 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

7. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perUU.
Hasil :
Tersedianya bahan bacaan dan perUU.
Jumlah Dana : Rp. 4.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 4.470.000,- atau 99,33 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

8. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.
Hasil :
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor.
Jumlah Dana : Rp. 25.767.500,-
Realisasi Keuangan : Rp. 25.685.000,- atau 99,68 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

9. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Keluaran :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Hasil :

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Jumlah Dana : Rp. 44.775.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 44.065.000,- atau 98,41 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

10. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Keluaran :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Hasil :

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Jumlah Dana : Rp. 85.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 66.875.000,- atau 78,13 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

11. **Program : Pelayanan Pengembangan Data/Informasi**

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Keluaran :

Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan.

Hasil :

12 bulan

Jumlah Dana : Rp. 31.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 19.788.500,- atau 63,83 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

12. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran :

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Hasil :

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

Jumlah Dana : Rp. 148.950.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 148.950.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 2 unit lemari arsip dorong, 1 unit jam digital, 1 unit AC split, 1 unit Podium pimpinan, 4 unit kursi pejabat eselon III, 1 unit proyektor, 1 unit stabilizer,

Realisasi Kinerja : 2 unit lemari arsip dorong, 1 unit jam digital, 1 unit AC split, 1 unit Podium pimpinan, 4 unit kursi pejabat eselon III, 1 unit proyektor, 1 unit stabilizer

13. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**
Keluaran :
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
Hasil :
Tersedianya peralatan gedung kantor.
Jumlah Dana : Rp. 20.250.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 20.250.000,- atau 100 %
Target Kinerja : 2 unit komputer
Realisasi Kinerja : 2 unit computer

14. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Hasil :
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor.
Jumlah Dana : Rp. 121.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 121.500.000,- atau 100 %
Target Kinerja : 1 paket ruang menyusui dan WC pelayanan 1 paket pagar taman, 1 paket pembuatan gazebo
Realisasi Kinerja : 1 paket ruang menyusui dan WC pelayanan 1 paket pagar taman, 1 paket pembuatan gazebo

15. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Hasil :
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
Jumlah Dana : Rp. 140.225.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 123.118.993,- atau 87,80 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %

16. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Hasil :
Terpeliharanya peralatan gedung kantor.
Jumlah Dana : Rp. 15.729.500

Realisasi Keuangan : Rp. 10.995.000,- atau 69,90 %

Target Kinerja : 1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit Laptop, 10 unit mesin TIK, 14 unit AC, 16 unit printer

Realisasi Kinerja : 1 unit genet, 18 unit PC, 14 unit Laptop, 10 unit mesin TIK, 14 unit AC, 16 unit printer

b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen.
Target PNS yang menyampaikan berkas untuk diusulkan ke Kantor Regional XII sebanyak 550 orang, yang terealisasi sebanyak 594 orang (108 %)
2. Pengelolaan administrasi pensiun pegawai
Target jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda, APS (atas permintaan sendiri) dan MPP sebanyak 200 orang, terealisasi sebanyak 225 orang (112,50 %)
3. Pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian
Target PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian sebanyak 30 kasus, dengan realisasi 36 kasus (120 %)
4. Pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan
Target diadakannya acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sebanyak 18 kali, dengan realisasi 20 kali (166,67 %)
5. Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian
Target data PNS yang dientry dalam jaringan data base selama tahun 2018 sebanyak 2700 data, dengan realisasi sebanyak 5000 data (185,19%)

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Kegiatan yang tidak tercapai target kinerja

1. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB Nomor 504 Tahun 2019 tentang Penetapan

Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang semula direncanakan selesai pada Tahun 2019, baru dapat dimulai bulan Oktober 2019. Sehingga pelaksanaannya ditunda menjadi bulan Januari s/d Maret 2020.

2. Kegiatan Formasi PNS, yang semula direncanakan dilakukan sosialisasi untuk pembaharuan data e-formasi terhadap peta jabatan dan usulan formasi Tahun 2020 melalui aplikasi yang akan dibuka pada Bulan September s.d November 2019. Namun sampai saat ini pembaharuan data pada aplikasi e-formasi masih belum dapat dilakukan karena masih terkunci oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan.
3. Kegiatan Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, permasalahan yang ditemukan adalah:
 - Peserta yang direncanakan untuk mengikuti dan lulus seleksi pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebanyak 5 orang, namun yang lulus seleksi hanya 1 (satu) orang.
 - Biaya pendidikan An. Muhammad Kadri yang dianggarkan sebanyak 2 semester @ Rp. 10.000.000,-, namun terealisasi dalam 2 semester hanya Rp. 12.500.000,-
 - Biaya bantuan hidup An. Muhammad Kadri yang direncanakan selama 12 bulan, ternyata yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada bulan Agustus 2019 (terrealisasi hanya 8 bulan)
 - Bantuan pendidikan dan penelitian untuk PNS yang mendapatkan Tugas Belajar diasumsikan akan melakukan penelitian pada Tahun 2019, namun sampai saat ini yang

bersangkutan belum melakukan penelitian/penyusunan skripsi.

4. Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin, memiliki permasalahan sebagai berikut:
 - Kesulitan untuk menemukan alamat suami/istri dari PNS yang mengajukan izin perceraian, karena untuk dapat diberikan izin perceraian kedua belah pihak harus diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang komprehensif sehingga dengan tidak diketahui alamat suami/istri dari PNS tersebut pemeriksaan menjadi kurang komprehensif, bisa jadi keterangan hanya didapat dari sebelah pihak saja. (untuk itu solusi perlunya tim turun ke lapangan untuk mencari keberadaan istri atau suami/keluarga dari PNS yang mengajukan perceraian tersebut)
 - PNS yang diperiksa sering tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh tim, karena menutupi kebohongan-kebohongan terkait masalah internal maupun eksternal yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga. Banyak dari PNS yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumah tangga terjadi hanya dari pasangannya saja.
 - Beberapa kepala perangkat daerah terindikasi menyembunyikan indisipliner/ permasalahan disiplin PNS/ bawahannya dikarenakan “rasa sosial” terhadap bawahannya.
 - Sulit untuk menemukan bukti pemeriksaan kasus untuk itu dibutuhkan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pemeriksaan Kasus namun anggaran terbatas.
5. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Penyesuaian Gelar, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - Ditemukannya keterlambatan yang sering terjadi dalam memasukkan bahan kenaikan pangkat dari beberapa OPD dan kecamatan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari beberapa OPD terkait, didapati kurang memahami tentang penghitungan angka kredit dan permasalahan kepegawaian

- Kesulitan dalam mencapai target kenaikan pangkat dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksaan berkas oleh pihak Kanreg XII BKN Pekanbaru
6. Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - Sarana dan prasarana berupa lemari tempat penyimpanan berkas tata naskah dan map tata naskah masih belum memadai/mencukupi karena keterbatasan anggaran
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian
 7. Kegiatan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK dengan permasalahan sebagai berikut
 - Aplikasi SIMPEG versi terbaru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menyajikan informasi sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.
 - Perlu diadakan sosialisasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIMPEG versi terbaru
 - Masih kurang validnya data yang akan di input karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan update data.

Kegiatan yang melebihi target kinerja

1. Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen.
Target PNS yang menyampaikan berkas untuk diusulkan ke Kantor Regional XII sebanyak 550 orang, yang terealisasi sebanyak 594 orang (108 %)
2. Pengelolaan administrasi pensiun pegawai
Target jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda, APS (atas permintaan sendiri) dan MPP sebanyak 200 orang, terealisasi sebanyak 225 orang (112,50 %)
3. Pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian
Target PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian sebanyak 30 kasus, dengan realisasi 36 kasus (120 %)
4. Pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan

Target diadakannya acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sebanyak 18 kali, dengan realisasi 20 kali (166,67 %)

5. Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian

Target data PNS yang dientry dalam jaringan data base selama tahun 2018 sebanyak 2700 data, dengan realisasi sebanyak 5000 data (185,19%)

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, maka diperlukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pelaksana teknis kegiatan lebih fokus lagi dalam perencanaan baik dari segi penganggaran maupun dari segi pelaksanaan.
2. Kuasa pengguna anggaran harus melakukan monitoring dan evaluasi secara kontiniu terhadap kegiatan yang dikelolanya
3. Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan, hal ini mengurangi terjadinya kesalahan yang timbul pada saat kegiatan sedang berlangsung.
4. Melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan.
5. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.
6. Mengevaluasi lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan agar bisa direalisasikan sebaik mungkin.
7. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kab. Pesisir Selatan (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan (terlampir)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari identifikasi permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah:

1. Tidak semua SDM aparatur BKPSDM memiliki kemampuan IT
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman sebagian aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian
4. Masih adanya beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya
5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan BKPSDM, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
 - a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
 - b. Sarana prasarana pelayanan administrasi BKPSDM yang masih kurang memadai.
 - c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi :
 - a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan kepegawaian
 - b. Belum terdatanya SDM aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan structural yang kosong di beberapa OPD oleh Baperjakat Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Kurangnya SDM aparatur di beberapa OPD sehingga penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan dari Badan Kepegawaian Negara

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019, yaitu : ***“Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025”***. Istilah “professional” dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja.

Bermartabat, istilah “bermartabat” dimaksudkan bahwa PNS melaksanakan kewenangan fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN, menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi”***.

Adapun aparatur negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2021 dapat kita uraikan berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah, penunjang penyusunan pelaporan OPD

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan

jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penunjang penyusunan pelaporan OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pengadaan bangunan/kantor, pengadaan kendaraan dinas

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pengadaan bangunan/kantor, pengadaan kendaraan dinas

3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tujuan :

Terlaksananya peningkatan program kerjasama informasi dan media massa melalui : penyebaran informasi pembangunan

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan program kerjasama informasi dan media massa melalui : penyebaran informasi pembangunan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bimtek dan kursus keterampilan, Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT), Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimtek

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT), Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimtek

5. Program Pendidikan Kedinasan

Tujuan :

Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;

Sasaran :

Terwujudnya pendidikan kedinasan untuk aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : penyusunan formasi dan seleksi penerimaan calon PNS; pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar, penyelenggaraan majelis pertimbangan pegawai, pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu, pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun

pegawai, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK, pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar PNS, pemeriksaan kasus PNS, masalah perceraian dan pembinaan disiplin ASN, pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas, pembekalan Calon PNS, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan, pemetaan potensi ASN, pembekalan pasangan pra nikah ASN, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kinerja ASN, pengelolaan tata naskah kepegawaian, penyuluhan dan sosialisasi peraturan ASN, pengukuran indek profesionalitas ASN, pengkoreksian angka kredit, pengarsipan administrasi SK jabatan dan pindah tugas, pengelolaan dan administrasi kenaikan gaji berkala dan impassing kenaikan gaji, pemberian reward pada PNS teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya.

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : penyusunan formasi dan seleksi penerimaan calon PNS; pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar, penyelenggaraan majelis pertimbangan pegawai, pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu, pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun pegawai, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK, pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar PNS, pemeriksaan kasus PNS, masalah perceraian dan pembinaan disiplin ASN, pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas, pembekalan Calon PNS, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan, pemetaan potensi ASN, pembekalan pasangan pra nikah ASN, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kinerja ASN, pengelolaan tata naskah kepegawaian, penyuluhan dan sosialisasi peraturan ASN, pengukuran indek profesionalitas ASN, pengkoreksian angka kredit, pengarsipan administrasi SK jabatan dan pindah tugas, pengelolaan dan administrasi kenaikan

gaji berkala dan impassing kenaikan gaji, pemberian reward pada PNS teladan (berkinerja) dan satya lencana karya satya.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2021 ditetapkan 6 program dengan 51 kegiatan pendukung, sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Hasil :

Terbayarnya jasa telpon, air dan listrik

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Hasil :

Bersih dan nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruang kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM

Hasil :

Lancarnya jasa administrasi keuangan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terbayarnya jasa petugas kebersihan

Hasil :

Bersih dan Nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 12 bulan

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait

Hasil :

Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

12. Penunjang Penyusunan Pelaporan OPD

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah laporan yang diselesaikan dalam 12 bulan

Hasil :

Laporan perencanaan dan keuangan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Hasil :

Adanya ruang rapat dan pagar kantor yang representatif.

Kelompok Sasaran :

Sarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Pemeliharaan Rutin/ Berakala Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas/perasional yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Kelompok Sasaran :

Kendaraan dinas operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Pengadaan bangunan/kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersedianya bangunan kantor yang representatif

Hasil :

Bangunan kantor yang representatif

Kelompok Sasaran :

Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Pengadaan kendaraan dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas yang akan disediakan

Hasil :

Kendaraan dinas roda 2 (dua)

Kelompok Sasaran :

Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

III. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah event yang diikuti dalam 12 bulan

Hasil :

Tercapainya penyampaian informasi pembangunan.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan.

Hasil :

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)

Masukan :

Dana yang tersedia.

Keluaran :

Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT)

Hasil :

Tercapainya Achievement Motivation Training (AMT).

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jenis bimtek yang diadakan dalam 12 bulan

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

V. Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur.

Hasil :

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur.

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Hasil :

Diterimanya sertifikat diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Latsar CPNS

Hasil :

Sertifikat Latsar CPNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan Formasi dan Seleksi Penerimaan ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah formasi yang diusulkan dan jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS.

Hasil :

Jumlah formasi yang disetujui oleh Menpan RB dan diterimanya SK CPNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi ijin/tugas belajar

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan jumlah rekomendasi ijin/tugas belajar yang dikeluarkan dalam 12 bulan

Hasil :

Terbayarkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada PNS dan rekomendasi ijin/tugas belajar

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP.

Hasil :

Keluarnya hasil keputusan disiplin terhadap kasus PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen

Hasil :

PNS mendapatkan karpeg, karis/karsu dan taspen

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional.

Hasil :

Diterimanya SK defenitif PNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

- 7. Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, Janda/Duda dan APS, Masa Persiapan Pensiun (MPP)
Hasil :
SK pensiun PNS.
Kelompok Sasaran :
Aparatur PNS.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan
- 8. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah data PNS yang di update dalam jaringan database.
Hasil :
Tersimpan data PNS di database untuk informasi kepegawaian.
Kelompok Sasaran :
Aparatur.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan
- 9. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar.
Hasil :
PNS yang menerima SK kenaikan pangkat.
Kelompok Sasaran :
Aparatur.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan
- 10. Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan disiplin PNS**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi.
Hasil :
Rekomendasi yang dikeluarkan bagi PNS yang melanggar Disiplin dan masalah perceraian.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

13. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Hasil :

Diterimanya Serftifikat Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

14. Pembekalan Calon PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan calon PNS

Hasil :

Diterimanya Serftifikat pembekalan

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

15. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi

Hasil :

Terpilihnya pejabat pimpinan tinggi

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

16. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan.

Hasil :

SK jabatan struktural/fungsional.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

17. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Pelantikan Jabatan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan jabatan

Hasil :

Diterimanya sertifikat sumpah PNS dan SK pelantikan

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

18. Pemetaan Potensi ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi ASN

Hasil :

Terpetakan potensi ASN

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

19. Pembekalan Pasangan Pra Nikah PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pasangan PNS yang dibekali.

Hasil :

Rekomendasi untuk melakukan pernikahan

Kelompok Sasaran :

PNS Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

20. Penyelenggaraan Tim Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kinerja ASN

Hasil :

Tercapainya sidang penilaian kinerja ASN

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

21. **Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersusunnya tata naskah dinas kepegawaian

Hasil :

Tata naskah dinas menjadi rapi

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

22. **Penyuluhan dan sosialisasi Peraturan ASN**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sosialisasi yang diadakan dalam 12 bulan

Hasil :

Diterimanya sertifikat

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

23. **Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah ASN yang diukur indek profesionalitas

Hasil :

Meningkatnya tingkat profesionalitas ASN

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

24. **Pengokoreksian Angka Kredit**

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah jabatan fungsional yang dihitung angka kredit

Hasil :

Lancarnya bahan kenaikan pangkat ASN fungsional tertentu

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

25. **Pengarsipan Administrasi SK Jabatan dan Pindah Tugas**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah SK Jabatan dan Pindah Tugas yang diarsipkan
Hasil :
Rapinya admistrasi SK jabatan dan pindah tugas
Kelompok Sasaran :
Aparatur.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan
26. **Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Impasing Kenaikan Gaji**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah berkas bahan kenaikan gaji berkala dan impasing kenaikan gaji
Hasil :
SK Kenaikan gaji berkala dan impasing kenaikan gaji
Kelompok Sasaran :
Aparatur.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan
27. **Pemberian Reward pada PNS Teladan (berkinerja) dan Satyalencana Karya Satya**
Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah PNS yang mengikuti PNS Teladan dan jumlah berkas satyalencana karya satya
Hasil :
Terpilihnya PNS Teladan dan sertifikat/piagam satya lencana karya satya
Kelompok Sasaran :
Aparatur.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Rencana kerja perubahan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, September 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003